

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2025 yang diperoleh dari *website* resmi BEI pada www.idx.co.id. Data yang digunakan yaitu terkait dengan *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan proporsi dewan komisaris independen. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan cara menetapkan sejumlah kriteria atau pertimbangan tertentu. Berikut merupakan proses *sampling* yang dilakukan beserta kriteria yang diterapkan.

Tabel 4. 1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor <i>energy</i> dan <i>basic materials</i> yang terdaftar di BEI Tahun 2022-2025.	161
2.	Perusahaan sektor <i>energy</i> dan <i>basic materials</i> yang tidak mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahunan secara berturut-turut Tahun 2022-2025.	(40)
3.	Perusahaan sektor <i>Energy</i> dan <i>Basic Materials</i> yang mengalami kerugian pada Tahun 2022-2025.	(38)
4.	Perusahaan sektor <i>Energy</i> dan <i>Basic Materials</i> yang tidak menyajikan data lengkap yang dibutuhkan dalam perhitungan variabel selama periode penelitian Tahun 2022-2025.	(53)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		30
Tahun pengamatan		4
Total Data		120

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2026

Berdasarkan tabel 4.1 hasil seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode *purposive sampling* menghasilkan 30

perusahaan sektor *energy* dan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2025, sehingga total sampel penelitian yang diperoleh adalah sebanyak 120 observasi ($N = 120$).

4.2 Analisis Data

Penelitian ini mengaplikasikan *software* IBM SPSS 26 sebagai instrumen utama dalam melakukan analisis data. Analisis data terdiri dari tiga komponen, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

4.2.1 Uji Statistik Deskriptif

Uji analisis deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk menyajikan dan mendeskripsikan data penelitian melalui total sampel, nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan deviasi standar (Ghozali, 2021). Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Tax Avoidance</i> (Y)	120	.04	.61	.2228	.06585
<i>Leverage</i> (X1)	120	.05	2.21	.6232	.39168
<i>Capital Intensity</i> (X2)	120	.01	.81	.3649	.22055
<i>Corporate Social Responsibility</i>	120	.32	1.00	.7385	.19361
Proporsi Dewan Komisaris Independen (X4)	120	.25	.80	.4616	.13283
Ukuran Perusahaan (Z)	120	26.86	33.02	30.1535	1.53001
Valid N (listwise)	120				

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan tabel 4.2, hasil analisis statistik deskriptif yang menggunakan 120 sampel data, didapatkan rincian sebagai berikut:

1. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diproksikan dengan ETR (*Effectif Tax Rate*) menghasilkan nilai minimum sebesar 0,04 pada PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (2025) dan PT Samator Indo Gas Tbk (2024), sedangkan ilai maksimum sebesar 0,61 pada Bumi Resources Tbk. (2023). Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel adalah sebesar 0,2228 dengan nilai deviasi standar sebesar 0,06585. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil yang artinya tidak menunjukkan penyebaran yang luas dari nilai rata-ratanya.
2. Variabel Independen pertama yaitu *leverage* yang diproksikan dengan rasio DER (*Debt to Equity Ratio*) memiliki nilai minimum sebesar 0,05 pada PT Dana Brata Luhur Tbk (2025) dan nilai maksimum sebesar 2,21 pada PT ABM Investama Tbk (2022). Nilai rata-rata data sebesar 0,6232 dengan nilai deviasi standar sebesar 0,39168. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata mencerminkan bahwa variasi data relatif kecil yang artinya tidak menunjukkan penyebaran yang luas dari nilai rata-ratanya.
3. Variabel independen kedua yaitu *capital intensity* yang diproksikan dengan CIR (*Capital Intensity Ratio*) menunjukkan nilai minimum sebesar 0,01 pada PT Golden Eager Energy Tbk (2022) dan nilai maksimum sebesar 0,81 pada PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (2023). Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel adalah sebesar 0,3649 dengan nilai deviasi standar sebesar 0,22055. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata

menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil yang artinya tidak menunjukkan penyebaran yang luas dari nilai rata-ratanya.

4. Variabel independen ketiga yaitu *corporate social responsibility* yang diproksikan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* (CSRDI) memiliki nilai minimum sebesar 0,32 pada Prima Andalan Mandiri Tbk (2022 & 2023), sedangkan nilai maksimum sebesar 1,00 pada PT Vale Indonesia Tbk (2023), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (2025), PT Lautan Luas Tbk (2024), PT Golden Energy Mines Tbk (2025), dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (2023-2025). Nilai rata-rata (*mean*) data sampel adalah sebesar 0,7385 dengan nilai deviasi standar sebesar 0,19361. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil sehingga tidak menunjukkan penyebaran yang luas dari nilai rata-ratanya.
5. Variabel independen keempat yaitu proporsi dewan komisaris independen yang diproksikan dengan PDKI, diukur menggunakan rasio jumlah dewan komisaris independen terhadap total dewan komisaris dalam perusahaan. Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 0,25 pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (2022) dan nilai maksimum sebesar 0,80 pada PT Dian Swastika Sentosa Tbk (2022 & 2023). Nilai rata-rata (*mean*) dari seluruh sampel adalah sebesar 0,4616 dengan nilai deviasi standar sebesar 0,13283. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil yang artinya tidak menunjukkan penyebaran yang luas dari nilai rata-ratanya.

6. Variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai logaritma total aset menghasilkan nilai minimum sebesar 26,86 pada PT Asiaplast Industries Tbk (2024), dan nilai maksimum sebesar 33,02 pada PT Indah Kiat Pulp Paper Tbk (2025). Nilai *mean* dari sampel adalah sebesar 30,1535 dengan nilai deviasi standar sebesar 1,53001. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* menunjukkan bahwa variasi data relatif kecil yang artinya tidak menunjukkan penyebaran yang luas dari nilai rata-ratanya.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda sehingga diperlukan uji asumsi klasik untuk mengetahui gangguan atau permasalahan dalam analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, uji molikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu uji persyaratan analisis data yang tujuannya untuk menguji distribusi residual variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2021). Jika diketahui distribusi residual normal, maka residual penelitian dianggap baik dan layak untuk digunakan sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya. Pengujian normalitas residual dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5%. Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06250778
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.100
	Negative	-.106
Test Statistic		.106
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,002 yang nilainya lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai residual belum terdistribusi normal sehingga belum memenuhi asumsi normalitas dan tidak layak untuk dilanjutkan ke pengujian parametrik (regresi linear). Menurut Ghozali (2021), pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov* dengan metode *Monte Carlo*.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Normalitas (Metode Monte Carlo)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.06250778
Most Extreme Differences	Absolute		.106
	Positive		.100
	Negative		-.106
Test Statistic			.106
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.128 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.119
		Upper Bound	.137

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan dalam tabel 4.4, diperoleh nilai signifikansi Monte Carlo sebesar 0,128. Nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa residual yang diuji berdistribusi normal dan layak untuk dilanjutkan ke pengujian regresi.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang akan diuji (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat diketahui menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dapat dinyatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DER	.944	1.059
	CIR	.892	1.121
	CSRDI	.541	1.848
	PDKI	.909	1.100
	SIZE	.559	1.790

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Keterangan:

DER = *Leverage*

CIR = *Capital Intensity*

CSRDI = *Corporate Social Responsibility*

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

SIZE = Ukuran Perusahaan

Hasil uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel 4.5 menunjukkan nilai tolerance dari *leverage*, *capital intensity*, *Corporate Social Responsibility* (CSR), proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan lebih besar dari nilai tolerance yang telah ditetapkan, yaitu $\geq 0,10$. Nilai tolerance *leverage* sebesar 0,944, *capital intensity* sebesar 0,892, CSR sebesar 0,541, proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,909, dan ukuran perusahaan sebesar 0,559. Selain itu, nilai VIF dari variabel independen dan variabel kontrol yang diteliti menunjukkan nilai ≤ 10 . Nilai VIF *leverage* sebesar 1,059, *capital intensity* sebesar 1,121, CSR sebesar 1,848, proporsi dewan komisaris independen sebesar 1,100, dan ukuran perusahaan sebesar 1,790. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual periode sebelumnya dalam model regresi (Ghozali, 2021:162). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi, penelitian ini menggunakan *Durbin-Watson* (DW test). Model regresi dinyatakan tidak terdapat gejala autokorelasi apabila $du < d < 4-du$. Hasil uji autokorelasi disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.792

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa hasil DW test sebesar 1,792 pada jumlah observasi sebanyak $(n) = 120$ dan jumlah variabel berupa empat

variabel bebas dan satu variabel kontrol sehingga $(k) = 5$. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* didapatkan nilai $dU = 1,7896$ dan nilai $4-du = 2,2104$. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, Nilai DW berada di antara nilai dU dan $4-dU$ yaitu $1,7896 < 1,792 < 2,2104$, maka model regresi dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dan dapat untuk dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah terdapat perbedaan *variance* residual antar pengamatan dalam model regresi (Ghozali, 2021:178). Model regresi dikatakan mengalami heteroskedastisitas apabila varians residual berbeda antar pengamatan. Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi menggunakan uji glejser, yaitu dengan mengabsolutkan nilai residual dari hasil regresi variabel independen. Jika nilai signifikansi variabel independen $> 0,05$ maka dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil dari uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.047	.099		.472	.638
	DER	.022	.011	.185	1.969	.051
	CIR	-.015	.020	-.069	-.721	.473
	CSRDI	.020	.030	.082	.661	.510
	PDKI	.019	.033	.055	.580	.563
	SIZE	-.001	.004	-.040	-.330	.742

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Keterangan:

DER = *Leverage*

CIR = *Capital Intensity*

CSRDI = *Corporate Social Responsibility*

PDKI = Proporsi Dewan Komisaris Independen

SIZE = Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh nilai signifikansi pada variabel *leverage* sebesar 0,051, *capital intensity* sebesar 0,473, *corporate social responsibility* sebesar 0,510, proporsi dewan komisaris independen sebesar 0,563, dan ukuran perusahaan sebesar 0,742. Nilai signifikansi seluruh variabel penelitian memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik yang terdiri atas uji koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parsial (uji t).

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi (Ghozali, 2021). Jika nilai koefisien determinasi semakin mendekati angka satu maka menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kemampuan yang besar dalam menggambarkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.315 ^a	.099	.060	.06386

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,060 atau sebesar 6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan mampu menjelaskan penghindaran pajak sebesar 6%, sedangkan sisanya sebesar 94% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan F bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil uji signifikansi simultan F pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.051	5	.010	2.507	.034 ^b
	Residual	.465	114	.004		
	Total	.516	119			

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan hasil uji F dengan nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,034 kurang dari 0,05 atau 5%. Hasil tersebut memberikan gambaran bahwa variabel *leverage*, *capital intensity*, *corporate social responsibility*, dan proporsi dewan komisaris independen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.2.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial t digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Dasar pengambilan keputusan uji

statistik t adalah dengan melihat nilai signifikansi apabila dibawah 0,05, maka terdapat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Apabila signifikansi diatas 0,05 maka tidak terdapat pengaruh variabel dependen terhadap independen. Hasil uji parsial (uji t) dalam penelitian ini disajikan pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.053	.138		.387	.699
	DER	-.036	.015	-.213	-2.324	.022
	CIR	.031	.028	.105	1.117	.266
	CSRDI	.015	.041	.045	.376	.708
	PDKI	.130	.046	.261	2.804	.006
	SIZE	.004	.005	.084	.706	.482

Sumber: Hasil IBM SPSS 26, pengolahan data sekunder pada 2026

Berdasarkan tabel 4.10, model persamaan regresi linear berganda dirumuskan dalam bentuk persamaan berikut.

$$ETR = \alpha - \beta_1 DER + \beta_2 CIR + \beta_3 CSR + \beta_4 PDKI + \beta_5 SIZE + e$$

Keterangan:

ETR	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
DER	= <i>Leverage</i>
CIR	= <i>Capital Intensity</i>
CSRDI	= <i>Corporate Social Responsibility</i>
PDKI	= Proporsi Dewan Komisaris Independen
SIZE	= Ukuran Perusahaan
<i>e</i>	= <i>Error</i>

Berdasarkan tabel 4.10, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022, yaitu lebih rendah dari 0,05.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap

penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Koefisien regresi sebesar -0,036 menunjukkan adanya hubungan negatif antara *leverage* dan *effective tax rate* (ETR). Dengan demikian, peningkatan nilai *leverage* akan diikuti oleh penurunan nilai ETR. ETR merupakan proksi yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga H1 diterima.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,266, yaitu lebih tinggi dari 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian. Hasil pengujian tersebut juga menjelaskan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan secara parsial.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,708, yaitu lebih tinggi dari 0,05. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil pengujian tersebut juga menjelaskan bahwa hipotesis ketiga (H3) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan secara parsial.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006, yaitu nilainya lebih rendah dari 0,05, Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Koefisien regresi bernilai 0,130 yang berarti arah hubungan bersifat positif yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka ETR semakin tinggi. ETR merupakan proksi yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga H4 diterima.

Berdasarkan tabel 4.10, hasil uji parsial (t) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol memiliki nilai signifikansi sebesar 0,482 dan nilainya lebih tinggi dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian.

4.3 Interpretasi Hasil

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dirangkum dan disajikan dalam tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	B	Sig	Hasil Uji
H1: <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	-0,036	0,022	Diterima
H2: <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>	0,031	0,266	Ditolak
H3: <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>	0,015	0,708	Ditolak
H4: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .	0,130	0,006	Diterima

Sumber: Data sekunder yang diolah peneliti (2026)

4.3.1 Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis variabel *leverage* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,022 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi (Unstandardized Coefficient B) sebesar -0,036 menunjukkan arah negatif yang menunjukkan bahwa semakin besar tingkat *leverage* maka *Effective Tax Rate* (ETR) semakin rendah. ETR merupakan proksi yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sehingga **H1 diterima**.

Penggunaan utang akan menimbulkan kewajiban keuangan yaitu berupa pembayaran pokok dan bunga yang harus dipenuhi secara berkala. Semakin besar utang yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban keuangan yang harus ditanggung perusahaan, sehingga dapat meningkatkan tekanan finansial bagi manajemen perusahaan karena perusahaan harus memastikan kemampuan memenuhi seluruh kewajiban keuangannya agar tidak menghadapi risiko gagal

bayar (Assyifa & Putri, 2026). Guna menghindari risiko gagal bayar, manajemen akan cenderung melakukan penghematan pada pengeluaran lain yang dapat dikendalikan, salah satunya melalui efisiensi beban pajak. Dalam kondisi *leverage* yang tinggi, manajemen lebih mudah merasionalisasi tindakan penghindaran pajak sebagai langkah yang wajar untuk mengurangi risiko likuidasi atau kebangkrutan (Saad & Firmansyah, 2024).

Strategi efisiensi pengeluaran perusahaan didukung oleh regulasi perpajakan yang berlaku. Beban bunga termasuk biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*tax-deductible expense*) sesuai dengan UU RI Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) yang secara otomatis dapat menurunkan laba kena pajak dan mengurangi besaran beban pajak perusahaan. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai salah satu strategi penghindaran pajak melalui peningkatan penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan selama masih berada dalam batas yang diperkenankan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015, yaitu sebesar empat dibanding satu (4:1). Melalui strategi pemanfaatan batas maksimum yang diperbolehkan oleh pemerintah, manajemen perusahaan dapat meningkatkan penggunaan utang untuk memperoleh manfaat pajak dari beban bunga yang timbul untuk menggerus laba kena pajak sehingga besaran pajak tanggungannya mengecil tanpa melanggar batas aman (*margin of safety*) perlindungan bagi kreditor.

Strategi pemanfaatan celah regulasi oleh pihak internal perusahaan tersebut pada akhirnya memicu benturan kepentingan yang sejalan dengan perspektif teori agensi oleh (Jensen & Meckling, 1976). Teori ini menyatakan bahwa agen akan

bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, dalam penelitian ini fiskus sebagai prinsipal dan perusahaan sebagai agen memiliki perbedaan kepentingan sehingga dapat memicu konflik kepentingan. Fiskus menginginkan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, perusahaan berupaya mempertahankan likuiditas dan mengurangi beban pengeluaran kas, termasuk melalui penghematan beban pajak agar mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur. Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah ini memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh Maghfiroh & Laksito (2025), Widodo & Wulandari (2021), dan Sembiring & Hutabaian (2022) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,266 yang nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian sehingga **H2 ditolak**. Hasil pengujian tersebut juga menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya jumlah investasi perusahaan pada aset tetap tidak memengaruhi ETR perusahaan yang artinya *capital intensity* tidak memicu tindakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini tidak selaras dengan temuan Soelistono & Adi (2022), Widodo & Wulandari (2021), dan Caroline & Fajriana (2025) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran

pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori agensi yang diprediksi dapat mendorong perilaku oportunistik manajemen tidak terbukti terjadi pada perusahaan dalam sampel penelitian ini. Tinggi atau rendahnya *capital intensity* tidak terbukti memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak digunakan sebagai upaya dalam menghindari pajak, melainkan sebagai bentuk investasi guna menunjang kegiatan operasional perusahaan. Meskipun investasi aset tetap membawa konsekuensi biaya jangka panjang untuk pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian berkala (Madusanka *et al.*, 2016), aset tetap pada dasarnya digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Firmansyah & Bahri (2022) menyatakan ketika kapasitas produksi berjalan optimal, perusahaan dapat memaksimalkan perolehan laba dalam jumlah yang jauh lebih tinggi sehingga mampu melampaui beban pemeliharaan maupun beban depresiasi yang timbul dari kepemilikan aset tetap. Pemanfaatan aset tetap yang optimal tersebut mampu meningkatkan stabilitas arus kas internal sehingga perusahaan tidak memiliki urgensi untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Hasil penelitian ini juga dapat dijelaskan oleh kondisi bahwa sebagian perusahaan di Indonesia memiliki aset tetap yang masa penyusutan fiskalnya telah berakhir sesuai dengan ketentuan perpajakan (Nurdyastuti & Suroto, 2022). Aset tetap yang sudah melewati batas umur tidak dapat disusutkan dan tidak dapat menjadi pengurang laba sebelum pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepemilikan aset tetap tidak selalu dimanfaatkan sebagai sarana perusahaan dalam

melakukan penghindaran pajak. Argumen tersebut diperkuat oleh penelitian Dewi & Oktaviani (2021), Aini & Kartika (2022), dan Apriani & Sunarto (2022) yang menegaskan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.3.3 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,708 dan nilainya lebih tinggi dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan yang termasuk dalam sampel penelitian sehingga **H3 ditolak**. Hasil pengujian tersebut juga menjelaskan bahwa tinggi atau rendahnya pengungkapan corporate social responsibility tidak memengaruhi ETR perusahaan yang artinya CSR tidak berpengaruh dalam menekan atau meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini tidak selaras dengan temuan Apriani (2025) dan Enjelia & Margie (2025) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teori agensi belum dapat menjelaskan pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan dalam sampel penelitian ini. Tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR tidak terbukti memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan strategi perpajakannya.

Pengukuran CSR dalam penelitian ini didasarkan pada pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran tersebut hanya mencerminkan tingkat pengungkapan, bukan kualitas maupun implementasi CSR.

Budiantara *et al.* (2020) menyatakan bahwa informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan tidak selalu mencerminkan pelaksanaan CSR yang sebenarnya. Dengan demikian, tingginya tingkat pengungkapan CSR belum tentu mencerminkan kualitas implementasi CSR yang lebih baik dibandingkan perusahaan dengan tingkat pengungkapan yang lebih rendah. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pengungkapan CSR belum tentu berkaitan dengan rendah maupun tingginya praktik *tax avoidance*. Argumen tersebut diperkuat oleh penelitian Dillareta dan Wuryani (2021), Frederica (2023), serta Jenifer dan Alfia (2023) yang menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, tingginya pengungkapan CSR belum tentu diikuti oleh rendahnya maupun tingginya praktik *tax avoidance*.

4.3.4 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance

Hasil uji hipotesis variabel proporsi dewan komisaris independen memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 dan nilainya lebih rendah dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang termasuk dalam sampel penelitian. Koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,130 yang berarti arah hubungan bersifat positif yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka nilai *Effective Tax Rate* (ETR) semakin tinggi. ETR merupakan proksi yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan penghindaran pajak. Nilai ETR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak proporsi

dewan komisaris independen maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, atau dapat dikatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sehingga **H4 diterima**.

Proporsi dewan komisaris independen mencerminkan persentase jumlah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi, hubungan bisnis, atau keterikatan finansial dengan pihak direksi maupun pemegang saham pengendali (Martin & Indrati, 2024). Keberadaan dewan komisaris independen merupakan salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang berfungsi mengawasi kebijakan perusahaan secara objektif. Temuan ini didukung oleh teori yang digunakan yaitu teori agensi oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa manajemen cenderung bertindak oportunistik demi kepentingan pribadi, salah satunya melalui motivasi pemaksimalan bonus yang dikaitkan dengan kinerja laba. Pencapaian target laba tersebut sering kali diupayakan oleh manajemen dengan cara meminimalkan beban-beban perusahaan, termasuk beban pajak. Upaya meminimalkan beban pajak dapat memicu manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Keberadaan komisaris independen memiliki peran penting melalui fungsi pengawasan yang objektif untuk membatasi tindakan oportunistik manajemen yang mengejar kompensasi pribadi sehingga kebijakan perpajakan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah praktik penghindaran pajak.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 20 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan

bahwa jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari total anggota dewan komisaris. Batasan persentase ini menjadi standar untuk memastikan fungsi kontrol di dalam perusahaan berjalan independen. Dengan terpenuhinya proporsi tersebut, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dapat berjalan optimal, sehingga mampu mempersempit celah bagi manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh Liliana & Karina (2025), Siregar *et al.* (2022), dan Kusumawardani *et al.* (2023) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Keberadaan dewan komisaris independen mampu memberikan tekanan (*pressure*) kepada manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Melalui fungsi pengawasan yang objektif tersebut, dewan komisaris independen efektif dalam membatasi kebijakan perpajakan yang agresif, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat dicegah.